

Perkembangan Logistik Halal

Rani Febriyanni

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Langkat

Abstract

Halal products' integrity is upheld when halal practices are consistently implemented throughout the storage process within uncontaminated warehouses, utilizing hygienic transportation methods for transferring goods from warehouses to stockpiles, and ensuring that packaging and marketing prevent exposure to impurities. The entire supply chain involved must adhere to halal standards, and LPPOM MUI facilitates this by issuing halal certifications that encompass logistics, guaranteeing halal practices. Among the tools available, logistics companies can adopt the SJH framework. This paper aims to elucidate the imperative for halal logistics, establishing an assurance that the halal status is unwaveringly preserved across all logistical operations and their associated supply chains, mitigating the risk of transgression into non-halal domains. Employing qualitative research methods, this study unveils that beyond products exclusively meant for Muslim consumption under Sharia, logistics itself demands meticulous attention. Thus, logistics operations aligned with Sharia principles emerge as a requisite. Adherence to these principles within logistics will safeguard the sanctity of halal products, ensuring their purity throughout the journey – from raw materials and packaging to storage and transportation – preventing any amalgamation with non-halal entities.

Article history:

Received : 2022-03-22

Revised : 2022-04-05

Accepted : 2022-04-09

Available : 2022-06-30

Keywords:

Halal Logistics, Supply Chain Integrity, Sharia Compliance

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Febriyanni, Rani. "Perkembangan Logistik Halal" *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam [ONLINE]*, Volume 4 Issue 1 (June, 2022): 21 – 30

***Corresponding author:**

ranifebriyanni1991@gmail.com

DOI:

10.35905/balanca.v4i1.5185

Page:

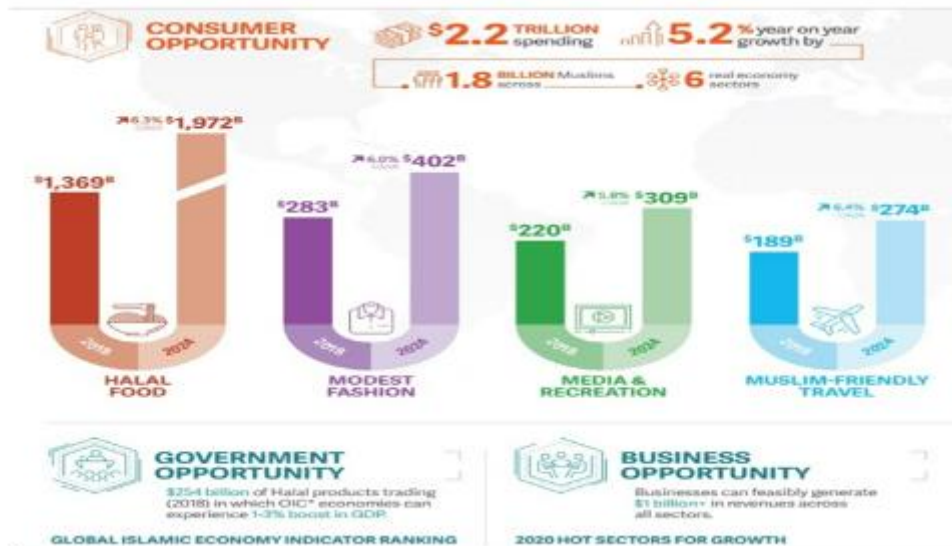
21-30

BALANCA with CC BY license. Copyright © 2021, the author(s)

PENDAHULUAN

Gaya hidup halal masyarakat global yang semakin berkembang mempengaruhi permintaan akan produk halal. Banyak negara fokus pada penyediaan produk Halal, dengan regulasi produk Halal selaras dengan Syariah Islam. Perkembangan industri produk halal Globalisasi sebagai proses yang semakin menghubungkan seluruh bangsa dan negara di dunia, menciptakan tatanan kehidupan baru atau koeksistensi bersama dengan geografi, ekonomi dan budaya masyarakat. Batasan globalisasi mempengaruhi lingkungan bisnis dunia dimana perdagangan bebas mewarnai perdagangan global. Peraturan tersebut tidak membatasi semua negara untuk menjual produknya (Yulia, 2015).

Menurut data dari Negara Ekonomi Islam Global 2019/2020, pengeluaran Muslim global untuk makanan dan gaya hidup halal adalah US\$2,2 triliun pada tahun 2018 dan diperkirakan akan tumbuh menjadi US\$3,2 triliun pada tahun 2024, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Sources: <https://ilmu.lpkn.id/2021/03/15>

Gambar 1. Global Islamic Economy

Gambar di atas menunjukkan pertumbuhan industri berbasis Halal di berbagai sektor. Halal merupakan syarat penting untuk memasuki pasar global. Menurut Laporan Negara Ekonomi Islam Dunia 2020/2021, Indonesia menempati urutan keempat dari 73 negara.



Sumber data: salaamgateway.com

Gambar 2. Top 15 Markets of the Global Halal Industry

Karena Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yaitu 87,2% dari 268 juta jiwa maka permintaan produk halal di Indonesia sangat tinggi, dan Indonesia mengeluarkan sertifikasi Halal terhadap produk halal yang diimpor, diangkut, dan dipasarkan di Indonesia. Yang berdasarkan UU Jaminan Produk Halal UU No. 33 Tahun 2014.

Pelaku industri yang memiliki produk halal dan akan memasarkan atau mendistribusikan kepada masyarakat harus memperhatikan, bahwa produknya akan tetap halal sampai ke tangan produsen, maka peran yang sangat penting adalah logistik. Logistik halal merupakan bagian dari manajemen rantai pasok, logistik halal akan menjamin produk halal dalam penyimpanan, transportasi dan distribusi produk sampai ke tangan konsumen. Maka dalam tulisan ini bertujuan menjelaskan perlunya logistik halal untuk memastikan dan menjamin bahwa sepanjang proses kegiatan logistik dan rantai pasoknya, status halal dapat dijaga dan dijamin sehingga tidak berubah menjadi haram.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif diarahkan untuk memahami interaksi manusia dan kompleksitas fenomena. Penelitian kualitatif memiliki dua karakteristik utama, yaitu pengumpulan data dalam bentuk narasi, deskripsi, dan dokumen, serta kurangnya aturan baku untuk pengolahan dan analisis data.

Dalam studi ini, pendekatan penelitian kepustakaan digunakan. Sumber data didefinisikan sebagai topik yang menerima sejumlah data yang relevan. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis seperti buku ilmiah dan artikel yang berhubungan dengan logistik halal. Proses pengumpulan data dimulai dengan menetapkan sumber-sumber referensi yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel yang berbicara tentang logistik halal. Setelah data terkumpul, dilakukan pemilihan sumber-sumber referensi yang relevan, baik sebagai rujukan primer maupun rujukan sekunder atau tambahan.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu terkait logistik halal, implementasinya di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi detail yang lebih dalam dan konteks di sekitar topik logistik halal, menggali wawasan yang mendalam tentang tantangan, peluang, dan solusi dalam menghadapinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kegiatan Halal Logistik

Logistik halal merupakan aspek yang krusial dalam rantai pasokan makanan yang memastikan integritas dan kesucian produk-produk halal dari tahap produksi hingga konsumsi. Secara umum, logistik halal mencakup serangkaian aktivitas fisik yang melibatkan penyimpanan, pengangkutan, dan pengelolaan data. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa produk halal dapat diidentifikasi, dilacak, dan dikelola dengan benar melalui komunikasi yang efisien dan manajemen yang baik di sepanjang rantai pasokan makanan (Kamaruddin et al., 2012).

Aktivitas dalam manajemen logistik halal mencakup beberapa aspek penting yang berkontribusi pada keberhasilan operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal. Beberapa komponen penting dalam manajemen logistik halal antara lain:

1. **Alat Pengangkutan Halal:** Pemilihan alat pengangkutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal menjadi langkah awal dalam menjaga keaslian produk. Pemisahan antara produk halal dan non-halal dalam pengangkutan menjadi perhatian utama untuk mencegah kontaminasi.
2. **Tempat Simpan dan Gudang:** Gudang dan tempat penyimpanan memiliki peran sentral dalam menjaga integritas produk halal. Pemisahan yang jelas, pengelolaan suhu yang tepat, serta pengendalian lingkungan yang bersih menjadi faktor-faktor kunci dalam pengelolaan gudang yang sesuai dengan standar halal.
3. **Manajemen Persediaan Halal:** Efisiensi dalam manajemen persediaan halal melibatkan pemantauan yang cermat terhadap tanggal kadaluwarsa, rotasi stok, dan pengelolaan persediaan secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terbuangnya produk halal yang sudah melewati masa konsumsi yang sah.
4. **Kontribusi pada Konsumen Halal:** Aspek ini menekankan pada ketersediaan produk halal bagi konsumen. Kegiatan logistik harus memastikan bahwa

produk halal dapat ditemukan dengan mudah di pasaran, memenuhi harapan konsumen yang mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip halal.

Efektivitas kegiatan logistik halal dapat dicapai dengan memastikan bahwa semua tahapan operasional sesuai dengan Siklus Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH merupakan kerangka kerja yang menggambarkan proses pengawasan dan jaminan terhadap kepatuhan halal suatu produk. Di Indonesia, penerapan SJH pada perusahaan logistik halal masih terutama berfokus pada tahap pergudangan atau *warehousing*. Meskipun demikian, penting untuk terus mengembangkan implementasi SJH ke tahapan-tahapan lainnya dalam rantai logistik, termasuk transportasi dan distribusi, guna memastikan keterhubungan yang mulus dalam menjaga kehalalan produk.

Logistik halal memiliki peran yang signifikan dalam menjaga integritas produk halal dalam rantai pasokan makanan. Manajemen yang efektif dari *aspek*-aspek logistik halal, mulai dari pengangkutan hingga penyimpanan, merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa produk yang mencapai konsumen adalah produk yang memenuhi standar kehalalan. Dengan integrasi yang lebih erat antara aktivitas logistik halal dan prinsip-prinsip SJH, diharapkan industri logistik halal di Indonesia dan di seluruh dunia dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Perkembangan Logistik Halal di Indonesia

Perusahaan penyedia jasa logistik harus menjamin produk tetap halal dengan memperhatikan beberapa hal seperti operasional perusahaan logistik yang berfokus pada produk halal, pemimpin dan karyawan memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan penjaminan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal (Jaafar et al., 2011). Penjaminan produk halal mencakup prinsip bahwa produk tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan yang haram, yang melibatkan pemisahan yang ketat antara benda halal dan benda haram. Jika terjadi kontaminasi yang melibatkan unsur haram pada peralatan atau fasilitas, langkah pembersihan harus dilakukan dengan mematuhi ajaran Islam.

Proses pemisahan benda halal dan haram dapat diimplementasikan melalui beberapa cara. Pertama, melalui pengaturan kompartemen yang terpisah untuk menyimpan produk halal dan haram. Selain itu, pengemasan juga menjadi faktor penting dalam memastikan pemisahan yang benar antara produk-produk ini. Selain aspek fisik, memberikan pemahaman dan pengetahuan yang tepat kepada karyawan yang terlibat dalam penanganan produk, peralatan, mesin, dan fasilitas juga merupakan langkah yang esensial. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip halal, karyawan dapat lebih efektif menjaga pemisahan yang diperlukan.

Penting untuk menjaga jaminan produk halal terutama ketika produk berada dalam pengawasan penyedia jasa logistik halal. Namun, ketika produk dialihkan ke perusahaan jasa logistik lain, risiko menjaga keutuhan produk halal dapat meningkat. Hal ini disebabkan oleh potensi penurunan pengawasan dan pengendalian yang diberlakukan oleh pihak lain. Terutama pada tahap pengeceran, di mana pengawasan mungkin tidak seketat pada tahap sebelumnya, perhatian ekstra diperlukan untuk memastikan bahwa produk

tetap mematuhi standar halal yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat dengan penyedia jasa logistik yang memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip halal akan memainkan peran krusial dalam menjaga integritas produk halal dalam rantai pasokan.

Perusahaan penyedia jasa logistik yang menjadi pelopor Sistem Jaminan Halal (SJH) Logistik adalah PT YCH Indonesia, selain itu ada PT Pos Indonesia (Persero) yang diinisiasi oleh Direktur Utamanya, yang mempersiapkan karyawannya memiliki pengetahuan pada bidang kehalalan dan pelabuhan halal pertama di Indonesia PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Firmansyah, 2015).

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC dan PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP) melakukan kerja sama dalam membangun dan mengoperasikan kawasan logistik halal terintegrasi di wilayah JIEP pada 2 Agustus 2016. Kerja sama ini memiliki tujuan membuat halal hub atau tempat persinggahan barang-barang dari Negara non muslim yang masuk ke Indonesia (Lestari & Halim, 2016).

PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) memiliki anak perusahaan bernama PT Multi Terminal Indonesia, IPC logistik ini menangani penyimpanan dan pendistribusian produk/baran halal (www.ipclogistiks.co.id). PT ini juga bekerja sama dengan LPPOM MUI untuk halal *hub port* di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara (Hutauruk, 2016).

Pengembangan logistik halal merupakan usaha yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam menjaga keaslian dan integritas produk halal dalam seluruh rantai pasok. Simatupang & Sridharan (2016) telah mengidentifikasi beberapa peran yang dapat diambil oleh para pemangku kepentingan ini. Pertama, sebagai penggerak awal atau inisiator, kelompok-kelompok yang membentuk perkumpulan logistik halal memiliki peranan sentral dalam membangun kesadaran dan komitmen terhadap prinsip-prinsip halal dalam aktivitas logistik.

Kedua, regulator atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan logistik halal, seperti standarisasi tempat penyimpanan, alat angkut, serta pengawasan sertifikasi halal. Ketiga, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan memiliki peran dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam logistik halal melalui riset dan pendidikan.

Keempat, peran penting juga dimainkan oleh penyedia teknologi, yang harus mendukung teknologi-logistik halal seperti sistem penanganan material, teknologi informasi dan komunikasi, serta solusi transportasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Kolaborasi erat antara semua pemangku kepentingan ini menjadi kunci utama dalam mengembangkan logistik halal secara efektif, menjaga kualitas dan keabsahan produk halal, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip halal dijaga dengan baik dalam semua tahapan dalam rantai pasok produk.

Permasalahan dan Tantangan

Implementasi logistik halal dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang perlu diatasi agar sistem ini berjalan efektif (Jalal & Abdul, 2017). Pertama, kekurangan dalam penerapan standar halal pada logistik halal di Indonesia merupakan kendala yang harus diatasi. Ketiadaan pedoman yang jelas dan merata mengenai standar halal dalam logistik dapat mempersulit pengaturan pemisahan antara produk halal dan haram dalam rantai pasok. Kedua, banyak perusahaan dalam rantai pasok belum sepenuhnya menyadari peluang bisnis yang terkait dengan standarisasi halal. Mereka mungkin belum menginternalisasi nilai dan manfaat dari menjaga integritas produk halal, yang berarti upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip halal dalam logistik mungkin belum menjadi prioritas. Ketiga, Indonesia menghadapi persaingan dari pesaing utama, seperti Malaysia, yang telah menjadi pionir dalam rantai pasok halal. Ini menciptakan tekanan untuk mempercepat pengembangan dan penerapan logistik halal di Indonesia agar tetap kompetitif di pasar internasional.

Keempat, ketersediaan alat dan perangkat lunak yang mendukung penjaminan kehalalan dalam logistik masih menjadi hambatan. Kekurangan alat ini dapat menghambat kemampuan untuk melacak dan memastikan pemisahan yang tepat antara produk halal dan haram selama perjalanan mereka melalui rantai pasok. Terakhir, kurangnya aturan dan skema asuransi yang terorganisir dapat menyulitkan proses implementasi logistik halal. Asuransi yang sesuai dan terstruktur akan membantu melindungi perusahaan dari risiko finansial yang mungkin timbul akibat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip halal dalam operasi logistik.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Peningkatan kesadaran, penerapan standar, pengembangan teknologi, dan pembentukan regulasi yang jelas dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong perkembangan yang lebih lanjut dalam bidang logistik halal di Indonesia.

Selain permasalahan yang telah diidentifikasi, logistik halal di Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan implementasi.

Pertama, tantangan dalam koordinasi dan kerja sama dalam membangun rantai pasokan halal membutuhkan waktu yang cukup panjang. Proses ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak yang terlibat, mulai dari produsen hingga konsumen. Penting bagi para pelaku dalam rantai pasok untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dinamika rantai pasok halal agar dapat meningkatkan daya saing dan keefektifan.

Kedua, perkembangan industri halal dan bisnis logistik halal menghadapi tantangan dalam berbagai aspek. Ini melibatkan berbagai sektor seperti produsen halal, pergudangan, teknologi, sumber daya manusia, dan kesadaran pelanggan. Pengembangan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam berbagai sektor ini memerlukan kerja sama lintas industri yang kuat. Ketiga, dalam konteks rantai pasok halal, perjalanan produk dari produsen hingga

konsumen sering kali kompleks dan memakan waktu yang lama. Hal ini dapat disebabkan oleh proses pengawasan ketat untuk memastikan kehalalan produk sepanjang perjalanan. Pengendalian ini, sementara penting, juga dapat menambah kompleksitas dan waktu yang diperlukan dalam pergerakan produk.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, kolaborasi, peningkatan kesadaran, dan pembangunan kapasitas menjadi sangat penting. Pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerjasama untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan efektif. Di samping itu, adopsi teknologi yang tepat dan pendekatan yang terencana dalam membangun rantai pasok halal akan membantu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh logistik halal di Indonesia.

Tidak hanya perusahaan dan pemerintah, pelaku logistik, konsumen, dan pihak lain juga menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan logistik halal yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan sistem (Jaafar et al., 2017). Pertama, meningkatnya biaya dalam pelaksanaan logistik halal menjadi kendala bagi pelaku industri. Kenaikan biaya ini dapat menjadi hambatan bagi perusahaan yang mungkin tidak bersedia mengalokasikan anggaran tambahan untuk mematuhi standar halal dalam rantai pasok mereka. Kedua, banyak produk yang diimpor dari negara non-Muslim, yang memunculkan keraguan terkait status halal dan keandalan logistik halal. Tantangan ini berkaitan dengan validitas sertifikat halal untuk produk yang berasal dari negara-negara tersebut.

Ketiga, produk halal memerlukan penanganan oleh karyawan yang memiliki pemahaman yang baik tentang logistik halal. Namun, masih terbatasnya jumlah orang yang benar-benar berpengetahuan dalam bidang ini dapat mempersulit proses pelaksanaan yang efektif. Pendidikan dan pelatihan khusus mungkin diperlukan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terkait dengan logistik halal. Keempat, pelacakan status produk halal selama proses logistik halal merupakan tantangan lainnya. Dalam rangka memastikan produk tetap memenuhi standar halal, ada kebutuhan untuk melacak produk dari produsen hingga konsumen dengan memperhatikan prinsip-prinsip halal.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kolaborasi dan komunikasi antara pelaku logistik, pemerintah, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya penting. Peningkatan kesadaran, pengembangan sumber daya manusia, serta pendekatan teknologi yang tepat dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan kelancaran pelaksanaan logistik halal.

Perkembangan logistik halal di Indonesia memiliki berbagai persoalan yang diidentifikasi oleh Zaroni, seorang *Senior Consultant Supply Chain* Indonesia (Puspa, 2022):

1. Persoalan literasi menjadi tantangan dalam perkembangan logistik halal. Banyak pelaku logistik dan masyarakat pada umumnya masih belum sepenuhnya memahami bahwa logistik halal merupakan bagian integral dari ekosistem halal secara keseluruhan. Mereka sering kali hanya fokus pada status halal produk dari segi komposisi bahan, tanpa memperhatikan bagaimana produk tersebut diolah dan didistribusikan.

2. Indonesia masih lebih terfokus pada sertifikasi halal untuk produk yang diproduksi oleh perusahaan atau industri. Fokus ini menyebabkan logistik halal sering diabaikan, padahal distribusi dan penanganan produk dalam rantai pasok juga memegang peran penting dalam memastikan produk tetap halal.
3. Pemerintah belum mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur sektor logistik halal, dan masih mengandalkan undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang belum sepenuhnya merinci aspek logistik.
4. Sistem rantai pasok produk halal di Indonesia belum dikembangkan secara komprehensif. Hal ini berarti bahwa proses logistik dan distribusi produk halal belum terintegrasi dengan baik dalam rangka menjaga kehalalan produk.
5. Integrasi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan belum mencapai tingkat optimal. Sinergi antara berbagai instansi ini penting untuk memastikan bahwa logistik halal dijalankan dengan efisien dan sesuai standar. Keenam, ketersediaan jasa logistik halal masih minim, yang dapat menghambat pengembangan dan implementasi logistik halal secara luas.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyuluhan, pelatihan, dan pembangunan kapasitas dalam hal logistik halal harus ditingkatkan agar ekosistem ini dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung keberlanjutan produk halal di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa logistik halal memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa status halal produk tetap terjaga dan dijamin sepanjang seluruh proses kegiatan logistik dan rantai pasoknya. Dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi dan kompetitif, pemahaman dan implementasi logistik halal menjadi kunci dalam menjaga integritas produk halal dari bahan baku hingga tangan konsumen.

Pentingnya logistik halal terletak pada prinsip-prinsipnya yang harus menghindari kontaminasi produk dengan bahan-bahan haram serta memastikan pemisahan yang jelas antara produk halal dan non halal. Dengan adanya permasalahan dan tantangan seperti kurangnya literasi, ketidakpastian status halal pada produk impor, dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dalam logistik halal, kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, memiliki potensi pasar industri halal yang besar. Oleh karena itu, implementasi logistik halal menjadi suatu keharusan. Dengan mengembangkan standar logistik halal yang kokoh dan melibatkan semua pemangku kepentingan, Indonesia dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip halal dipatuhi dengan ketat dalam seluruh tahap proses logistik dan rantai pasok. Hal ini akan memberikan keyakinan

kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi adalah benar-benar halal, menjaga kepercayaan konsumen, dan membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan dalam industri halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, T. (2015). *PT Pos Dukung Logistik Halal*.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/12/16/nzfecq377-pt-pos-dukung-logistik-halal?>
- Hutauruk, D. (2016). *Pelabuhan Halal Beroperasi Bulan Depan*.
<http://lautindo.com/pelabuhan-halal-beroperasi-bulandepan>
- Jaafar, H. S., Endut, I. R., Faisol, N., & Omar, E. N. (2011). *Innovation in logistics services-halal logistics*. 844-851.
- Jaafar, H. S., Faisol, N., Rahman, F. A., & Muhammad, A. (2017). *Halal logistics versus halal supply chain: A preliminary insight*. 579-588.
- Jalal, Q., & Abdul, R. (2017). *Pengembangan Logistik Halal di Indonesia*. 320-326.
- Kamaruddin, R., Ibrahimi, H., & Shabudin, A. (2012). Willingness to pay for halal logistics: The lifestyle choice. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 50, 722-729.
- Lestari, D., & Halim, F. (2016). *Indonesia Akan Bangun Pusat Logistik Halal*.
<https://www.viva.co.id/arsip/804075-indonesia-akan-bangun-pusat-logistik-halal>
- Puspa, A. W. (2022). *Pengembangan Logistik Halal RI Hadapi Sejumlah Tantangan, Apa Saja?*
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220614/98/1543531/pengembangan-logistik-halal-ri-hadapi-sejumlah-tantangan-apa-saja>
- Simatupang, T. M., & Sridharan, R. (2016). A critical analysis of supply chain issues in construction heavy equipment. *International Journal of Construction Management*, 16(4), 326-338.
- Yulia, Lady. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 121-162.